

**MIGRASI SIRKULER DALAM PENINGKATAN EKONOMI DESA**



**IKOPIN**  
University

Disusun Oleh :  
Siti Maryam, SE., M.Si.

**UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA  
(IKOPIN UNIVERSITY)**

**KAWASAN PENDIDIKAN TINGGI  
JATINANGOR**

**SUMEDANG**

**2022**

**IKOPIN**  
University

**MIGRASI SIRKULER DALAM PENINGKATAN EKONOMI DESA**

**Disusun Oleh :**

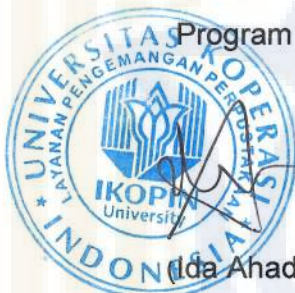
**Siti Maryam, SE., M.Si.**

Didokumentasikan

Pada Perpustakaan Universitas Koperasi Indonesia

(Ikopin University)

Program S1 dan D3



(Ida Ahadiyah, S.Sos.)

Kepala Perpustakaan Universitas Koperasi Indonesia

**UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA**

**(IKOPIN UNIVERSITY)**

**KAWASAN PENDIDIKAN TINGGI**

**JATINANGOR**

**SUMEDANG**

**2022**

**IKOPIN**  
University

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
BAB II. PEMBAHASAN	6
2.1. Landasan Teori	6
2.2. Pentingnya Migrasi Sirkuler sebagai Faktor Peningkatan Ekonomi Desa	9
2.3 Dampak Migrasi Sirkuler terhadap Peningkatan Ekonomi Desa	12
2.3 Peningkatan Ekonomi Desa dalam Peningkatkan Pembangunan Ekonomi Indonesia	16
BAB III. PENUTUP	18
3.1 Kesimpulan	18
3.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	19

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Migrasi Masuk, Keluar, dan Neto Provinsi Jawa Tengah, 1990-2005	3
Tabel 2. Bentuk-bentuk Mobilitas Penduduk	8
Tabel 3. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Tiap Bulan untuk Makanan dan Bukan Makanan daerah Pedesaan di Jawa Tengah Tahun 1996, 1999, 2002, 2005 dan 2008 (Rupiah)	15



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Data penduduk Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan proporsi penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan jika dibandingkan di perkotaan tidak lagi berbeda jauh, yakni 113,7 juta jiwa di perdesaan dan 106,2 juta jiwa di perkotaan (BPS, 2005). Namun, perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan wilayah di antara keduanya menunjukkan kawasan perdesaan masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan perkotaan. Berdasarkan data pada tahun 2011 diketahui bahwa jumlah desa di Indonesia adalah sekitar 69.249 desa, dan 45% diantaranya masuk ke dalam kategori desa tertinggal. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2011 mencapai 18,9 juta jiwa, jauh lebih tinggi daripada di perkotaan, yaitu 11 juta jiwa. Sementara itu, jangkauan pelayanan infrastruktur di perdesaan masih jauh dari memadai. Misalnya, baru sekitar 6,4 persen rumah tangga perdesaan yang telah dilayani oleh infrastruktur perpipaan air minum, sedangkan di perkotaan mencapai 32 persen; sementara itu, untuk pelayanan telekomunikasi, dari total 69.249 desa di Indonesia, sebanyak 43.000 desa masih belum memiliki fasilitas telekomunikasi.

Data juga menunjukkan masih relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja di perdesaan karena aktivitas ekonomi perdesaan masih bertumpu pada sektor pertanian (primer). Berdasarkan Susenas 2003, pangsa tenaga kerja di perdesaan pada sektor pertanian mencapai 67,7 persen. Padahal secara nasional, meski sektor pertanian menampung 46,3 persen dari 90,8 juta penduduk yang bekerja, sumbangannya dalam pembentukan PDB hanya 15,0 persen. Menguatnya desakan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian, terutama di Pulau Jawa, tidak hanya merusak sistem irigasi yang sudah terbangun, tetapi juga semakin menurunkan produktivitas tenaga kerja di perdesaan dengan meningkatnya rumah tangga petani gurem. Jika hal itu dibiarkan, maka angka kemiskinan di perdesaan semakin meningkat dan tingginya angka migrasi dari desa ke kota-kota besar sehingga pada gilirannya akan membebani dan memperburuk permasalahan di perkotaan. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia, tentunya tak dapat lepas dari pembangunan ekonomi di desa-desa yang ada di negara ini. Dinamika ekonomi pedesaan yang merupakan bagian integral dari sistem perekonomian, tidak terlepas dari sistem perekonomian nasional secara keseluruhan. Berbagai kesenjangan yang mewarnai

perkembangan sosial ekonomi desa-kota sebagai eksekusi dari strategi pembangunan yang selama tiga dasawarsa terakhir cenderung bersifat *urban biased* menyebabkan potensi perekonomian pedesaan tak dapat didayagunakan secara maksimal (Susilowati, et.al, 2000).

Kekhawatiran meningkatnya arus penduduk pedesaan yang menuju perkotaan, sementara daerah perkotaan belum siap menampung mereka merupakan salah satu alasan khusus mengapa gerak penduduk pedesaan perlu mendapat prioritas perhatian. Selain itu, walaupun studi sudah banyak dilakukan, perhatian gerak penduduk pedesaan masih perlu terus diberikan. Pada masa lampau, kebanyakan studi-studi gerak penduduk memusatkan perhatian pada gerak penduduk permanen, terutama yang berkaitan dengan transmigrasi dan perkiraan migrasi bersih antar daerah dan pulau. Sejak 1970-an terjadi pergeseran perhatian, telah ada studi-studi yang pusat perhatiannya lebih umum dengan tidak membatasi diri hanya pada dimensi gerak penduduk permanen. Fenomena migrasi, sirkulasi, dan komutasi sekaligus diperhatikan (Rusli, 1984).

Seirama dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta kondisi politik dan keamanan, gerak penduduk di Indonesia telah semakin rumit (kompleks). Ragamnya meliputi antara lain mobilitas internasional, desa-kota termasuk mobilitas musiman, antar wilayah (antarpropinsi) termasuk transmigrasi. Mobilitas adalah suatu hal yang wajar sebagai reaksi pada perkembangan sosial-ekonomi, politik dan keamanan dan tidak mungkin dicegah. Yang perlu dicermati adalah dampaknya baik positif maupun negatif, baik bagi daerah yang ditinggalkan maupun didatangi dan untuk para migran sendiri beserta keluarganya, serta keseimbangan dalam pola laju geraknya.

Tingginya arus migrasi antar provinsi membawa konsekuensi meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan, yaitu dari 30,9% (1990) meningkat menjadi hampir 40 % (2000). Di Pulau Jawa lebih dari sepertiga penduduk (35,65%) tinggal di daerah perkotaan. Jika ditambah dengan banyaknya penduduk pedesaan di Jawa yang melakukan sirkulasi dan komutasi ke tempat kerjanya di kota, maka jumlah penduduk yang tinggal dan menggantungkan hidupnya di kota semakin besar.

Tabel 1. Migrasi Masuk, Keluar, dan Neto Provinsi Jawa Tengah, 1990-2005

Tahun	Migrasi Masuk <sup>a</sup>	Migrasi Keluar <sup>b</sup>	Migrasi Netto <sup>c</sup>
1990	384,753	1,159,694	-774,941
1995	351,942	732,415	-380,473
2000	354,204	1,017,494	-663,290
2005	327,604	662,193	-334,589

Sumber : Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1985, 1995, 2005

Keterangan :

a) Penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut status migrasi risen (migrasi masuk)

b) Arus migrasi risen antar provinsi

c) Migrasi netto merupakan selisih antar migrasi masuk terhadap migrasi keluar

Catatan: - Migrasi risen adalah migrasi dimana tempat tinggal seseorang pada saat pencacahan berbeda dengan tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu.

Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa gambaran migrasi penduduk selalu minus migrasi netonya, hal ini dapat diartikan bahwa lebih banyak penduduk yang bermigrasi keluar provinsi baik itu ke provinsi lainnya maupun ke luar negeri. Dalam konteks migrasi internal, banyaknya penduduk pedesaan yang bermigrasi ke kota karena adanya beragam alasan, seperti untuk melanjutkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, mengikuti orang tua, suami/ istri dan sebagainya. Goldscheider (1985) menggambarkan adanya variasi tipe-tipe migrasi yang kompleks dalam struktur sosial suatu masyarakat. Oleh karena itu, perubahan struktur sosial masyarakat tidak hanya mengubah pola-pola migrasi, tetapi perubahan migrasi secara perlahan-lahan bisa mengubah struktur sosial masyarakat di suatu komunitas atau kelompok-kelompok sosial yang berbeda.

Menurut Todaro (2004), migrasi adalah suatu proses perpindahan sumber daya manusia dari tempat-tempat yang produk marjinal sosialnya nol ke lokasi lain yang produk marjin sosialnya bukan hanya positif, tetapi juga akan terus meningkat sehubungan dengan adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

Pelaku migrasi sirkuler sebagian besar terdiri dari: buruh tani, penduduk pedesaan yang bukan petani (pedagang, tukang dengan keterampilan tertentu, buruh serabutan), dan penganggur (tanpa pendidikan dan/atau dengan sedikit bekal pendidikan). Di samping itu, di antara mereka terdapat pula petani kecil/ gurem dan/atau petani yang tidak bertanah (punya tanah dan punya modal) yang turut ambil bagian dalam kegiatan migrasi sirkuler ini.

Terkait dengan ulasan di atas migrasi dapat menyebabkan adanya transformasi sosial-ekonomi. Transformasi sosial-ekonomi dapat didefinisikan sebagai “proses perubahan susunan hubungan-hubungan sosial-ekonomi (sebagai akibat pembangunan). Lee (1992) dalam teorinya “ Dorong-Tarik” (*Push-Pull Theory*) berpendapat bahwa migrasi dari desa

ke kota disebabkan oleh faktor pendorong di desa dan penarik di kota. Teori tersebut menerangkan tentang proses pengambilan keputusan untuk bermigrasi yang dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan, faktor-faktor rintangan, dan faktor-faktor pribadi. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal dan tujuan dibedakan menjadi tiga, yaitu: faktor-faktor daya dorong (*push factor*), faktor-faktor daya tarik (*pull factor*), dan faktor-faktor yang bersifat netral (*neutral*).

Faktor-faktor yang bersifat netral pada dasarnya tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk bermigrasi. Todaro (2004) menjelaskan bahwa pertumbuhan migrasi dari desa ke kota yang terus menerus meningkat merupakan penyebab utama semakin banyaknya pemukiman-pemukiman kumuh di perkotaan, namun sebagian lagi disebabkan lagi oleh pemerintah di masing-masing negara paling miskin. Sadar atau tidak mereka juga turut menciptakan pemukiman kumuh tersebut. Maka dari itu, kebanyakan warga desa memilih untuk melakukan migrasi sirkuler. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dikaji hubungan antara migrasi dan pertumbuhan ekonomi di desa, sejauh mana peranan pembangunan ekonomi desa melalui migrasi sirkuler dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia.





## **I.2 Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang akan dibahas dalam makalah ini ialah :

1. Mengapa migrasi sirkuler menjadi faktor penting bagi peningkatan ekonomi desa?
2. Apa dampak yang dihasilkan dari migrasi sirkuler terhadap peningkatan ekonomi desa?
3. Sejauh mana peningkatan ekonomi desa bisa meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia?

## **I.3 Tujuan Penulisan**

Dari rumusan masalah yang ada tujuan penulisan makalah ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan migrasi sirkuler merupakan faktor penting bagi peningkatan ekonomi desa.
2. Untuk mengetahui dampak dari migrasi sirkuler terhadap peningkatan ekonomi desa.
3. Untuk menjadikan migrasi sirkuler sebagai salah satu solusi bagi pembangunan ekonomi nasional berbasis kemajuan ekonomi desa.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Landasan Teori**

Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan menjadi salah satu bagian dari proses pembangunan. Aktivitas perpindahan penduduk dari desa ke kota hanya merupakan salah satu penyebab proses urbanisasi, di samping penyebab-penyebab lain seperti pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan, perluasan wilayah, maupun perubahan status wilayah dari daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan. Proses urbanisasi di Indonesia diperkirakan akan lebih banyak disebabkan migrasi desa-kota, yang didasarkan pada makin rendahnya pertumbuhan alamiah penduduk di daerah perkotaan, relatif lambannya perubahan status dari daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan, serta relatif kuatnya kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan yang "urban bias", sehingga memperbesar daya tarik daerah perkotaan bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan (Priyono, 2000).

Fenomena migrasi sangat mewarnai di beberapa negara berkembang, termasuk di berbagai daerah di Indonesia, terutama dalam konteks, dimana banyak tenaga kerja yang berasal dari daerah pedesaan mengalir ke daerah perkotaan. Proses migrasi yang berlangsung dalam suatu negara (*internal migration*) dianggap sebagai proses alamiah yang akan menyalurkan surplus tenaga kerja di daerah-daerah ke sektor industri modern di kota-kota yang daya serapnya lebih tinggi, walaupun pada kenyataannya arus perpindahan tenaga kerja dari daerah pedesaan ke perkotaan tersebut telah melampaui tingkat penciptaan lapangan kerja, sehingga migrasi yang terjadi jauh melampaui daya serap sektor industri dan jasa di daerah perkotaan (Todaro, 1998).

Mantra (1992) juga menjelaskan bahwa motivasi utama orang melakukan perpindahan dari daerahnya (pedesaan) ke perkotaan adalah motif ekonomi. Motif tersebut berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Kondisi yang paling dirasakan menjadi pertimbangan rasional, dimana individu melakukan mobilitas ke kota adalah adanya harapan untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di desa. Senada dengan hal di atas, Robert dan Smith (1977) juga memberikan penjelasan seperti dikutip oleh Hossain (2001) bahwa tidak meratanya pekerjaan dan penghasilan pertanian di pedesaan menjadi motivasi migrasi desa-kota. Motivasi tersebut

senada dengan model migrasi Todaro (Todaro, 1992; 1998) yang melandaskan pada asumsi bahwa migrasi dari desa ke kota pada dasarnya merupakan suatu fenomena ekonomi, dimana terdapat perbedaan penghasilan yang diharapkan daripada penghasilan aktual antara desa-kota.

### **2.1.1. Teori Migrasi**

Pengertian migrasi menurut PBB dikutip Suharso (1996) yaitu “migrasi adalah suatu bentuk mobilitas keruangan (*spatial mobility*) dari suatu unit geografis ke unit geografis lainnya yang disertai dengan perubahan tempat tinggal”. Berkenaan dengan kajian ekonomi migrasi internal, Todaro (1992) menjelaskan teori migrasi yang diformulasikan oleh Lewis (1954), yaitu tentang proses perpindahan tenaga kerja desa-kota, dimana model yang dikembangkan Lewis pada tahun 1954 tersebut diperluas Fei dan Ranis pada tahun 1961 dan merupakan teori umum yang diterima dan dikenal dengan Model Lewis- Fei-Ranis (L-F-R).

Peribahasa “ada gula ada semut” menjelaskan kondisi paling cocok dengan adanya fenomena proses migrasi desa-kota. Para migran nonpermanen (sirkuler) berperilaku seperti semut, maksudnya bila semut menemukan makanan di suatu tempat, makanan itu tidak dimakan di tempat itu, tetapi dibawa bersama teman-temannya ke sarangnya (Ida Bagoes, 2000).

Menurut Oishi (2002) adalah mengenai *Network theory*, yang mengkaitkan proses migrasi melalui hubungan personal, kultur, dan hubungan-hubungan sosial lain. Oishi (2002) menjelaskan bahwa di negara-negara pengirim migran, informasi tentang pekerjaan dan standar hidup di luar negeri secara efisien disampaikan melalui jaringan personal seperti teman dan tetangga yang telah bermigrasi. Sedangkan di negara-negara penerima (negara tujuan), masyarakat migran sering membantu laki-laki dan wanita seusiaanya (sejawat) untuk bermigrasi, mendapatkan suatu pekerjaan, dan menyesuaikan dengan suatu lingkungan baru. Jaringan yang demikian ini mengurangi biaya-biaya migrasi bagi para pendatang baru, yang menyebabkan para migran yang potensial untuk meninggalkan negara (daerah) mereka.

### **2.1.2. Bentuk-bentuk Mobilitas Penduduk**

Oleh Mantra (2000) dijelaskan bahwa mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *pertama*, mobilitas penduduk vertikal, yang sering disebut dengan perubahan status. Contohnya adalah perubahan status pekerjaan, dimana seseorang semula bekerja dalam sektor pertanian sekarang bekerja dalam sektor non-pertanian. *Kedua*, mobilitas

penduduk horisontal, yaitu mobilitas penduduk geografis, yang merupakan gerak (*movement*) penduduk yang melewati batas wilayah menuju wilayah lain dalam periode waktu tertentu.

Selanjutnya Mantra (2000) menjelaskan bila dilihat dari ada tidaknya niatan untuk menetap di daerah tujuan, mobilitas penduduk dapat pula dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk permanen atau migrasi; dan mobilitas penduduk non-permanen. Jadi, menurut Mantra (2000) migrasi adalah gerak penduduk yang melintas batas wilayah asal menuju ke wilayah tujuan dengan niatan menetap. Sebaliknya, mobilitas penduduk non-permanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan. Sedangkan menurut Steele (1983), seperti dikutip Mantra (2000), bila seseorang menuju ke daerah lain dan sejak semula sudah bermaksud tidak menetap di daerah tujuan, orang tersebut digolongkan sebagai pelaku mobilitas non-permanen walaupun bertempat tinggal di daerah tujuan dalam jangka waktu lama.

Lebih lanjut menurut Mantra (2000), gerak penduduk yang non-permanen (*circulation*) ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ulang-alik (Jawa = nglaju; Inggris = *commuting*) dan menginap atau mondok di daerah tujuan. Mobilitas ulang-alik adalah gerak penduduk dari daerah asal menuju ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dengan kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Sedangkan mobilitas penduduk mondok atau menginap merupakan gerak penduduk yang meninggalkan daerah asal menuju ke daerah tujuan dengan batas waktu lebih dari satu hari, namun kurang dari enam bulan. Secara ringkas bentuk-bentuk mobilitas penduduk di atas diringkas dalam *tabel 2*.

Tabel 2. Bentuk-bentuk Mobilitas Penduduk

Bentuk Mobilitas	Batas Wilayah	Batas Waktu
1. Ulang-alik ( <i>commuting</i> )	Dukuh ( <i>dusun</i> )	6 jam atau lebih dan kembali pada hari yang sama
2. Menginap/mondok di daerah tujuan	Dukuh ( <i>dusun</i> )	Lebih dari satu hari tetapi kurang dari 6 bulan
3. Permanen/menetap di daerah tujuan	Dukuh ( <i>dusun</i> )	6 bulan atau lebih menetap di daerah tujuan

Sumber: Ida Bagoes, 2000

### **2.1.3. Pola Migrasi Desa - Kota**

Pola migrasi di negara-negara yang sudah berkembang pesat biasanya sangat kompleks. Fenomena ini menggambarkan kesempatan ekonomi yang lebih seimbang dan menunjukkan saling ketergantungan (*interdependensi*) antarwilayah di dalamnya, serta merefleksikan keseimbangan aliran sumberdaya manusia dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang, pola migrasi yang terjadi menunjukkan suatu pengutuban (*polarisasi*), yaitu pemusatan arus migrasi ke wilayah-wilayah tertentu saja, khususnya kota-kota besar (Tommy, 1994). Hal yang sama juga dijelaskan oleh Titus (1991) bahwa pola migrasi desa-kota di negara berkembang (termasuk di Indonesia) menunjukkan adanya konsentrasi pendatang yang tinggi di kota-kota besar seperti misalnya Jakarta, yaitu kota-kota yang relatif mempunyai sektor modern yang besar dan dinamis. Sedangkan kota-kota kecil lainnya yang kurang dinamis seringkali menunjukkan tingkat migrasi netto (selisih migrasi keluar dengan migrasi masuk) yang rendah. Dengan demikian dikemukakan oleh (Titus, 1991) bahwa migrasi desa-kota tidak hanya disebabkan oleh faktor dorongan di desa, tetapi juga oleh faktor daya tarik di kota. Berkenaan dengan hal tersebut, perpindahan (*mobilitas*) tenaga kerja desa-kota tidak selalu berpola pada pergerakan tenaga kerja dari daerah kecil (*kecamatan/kabupaten*) ke daerah besar (*kota propinsi/ibu kota*). Pola daerah tujuan tenaga kerja tersebut menurut Yang (1992) mempunyai empat kategori, yaitu: *urban town*, *small city*, *medium-sized city* dan *big city*.

## **2.2 Pentingnya Migrasi Sirkuler sebagai Faktor Peningkatan Ekonomi Desa**

Masyarakat desa sebagai dasar awal dalam pembangunan di Indonesia, sampai saat ini masih sering terlupakan. Masyarakat desa pada umumnya sebagian besar dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Pemenuhan akan kebutuhan mereka pun rasanya masih sulit untuk terpenuhi. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara tidak lepas dari pembangunan bagian kecilnya sekalipun, yaitu desa. Kemajuan perekonomian desa-desa dan semua wilayah atau dengan kata lain pemerataan kemajuan ekonomi merupakan target penting dalam pembangunan ekonomi negara.

Kondisi desa saat ini pun masih cukup memprihatinkan, sekitar 45% desa di Indonesia masih masuk dalam kategori tertinggal (Yusuf, 2006). Oleh karena itu, kemajuan perekonomian desa memiliki andil yang cukup besar, dan salah satu solusi yang kami tawarkan untuk memajukan perekonomian desa untuk mencapai keseimbangan kesempatan

ekonomi antara desa dan kota adalah dengan migrasi sirkuler. Karena peningkatan ekonomi desa yang dilakukan dengan kesadaran penuh tiap individu yang berada di dalamnya akan membangun sistem perekonomian yang lebih maju dan kuat, dimana ini bisa terbentuk dengan adanya migrasi sirkuler yang terencana.

Menurut Kartomo (Wirosuhadjo, 1981:116) definisi migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/ Negara ataupun batas administratif/ batas bagian Negara. Selanjutnya Kartomo mengatakan bahwa apabila seseorang tidak bermaksud menetap di daerah yang didatangi dan telah tinggal di daerah itu kurang dari tiga bulan, maka orang tersebut dapat digolongkan dalam migrasi sirkuler. Sementara Hadi Supadmo (1991:2) mendefinisikan mobilitas sirkuler adalah penduduk yang bekerja di luar wilayah desanya dan pulang kembali setelah minimal dua hari dan maksimal enam bulan baik secara teratur maupun tidak. Batas waktu minimal dua hari untuk membedakan dengan mobilitas ulang-alik dan batas waktu maksimal enam bulan untuk membedakan dengan migran menetap. Mantra (1988), menyatakan bahwa batasan tempat dan waktu tersebut lebih banyak ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Mobilitas atau perpindahan penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Oleh sebab itu, tidak terlalu tepat untuk hanya menilai semata-mata aspek positif maupun negatif dari mobilitas penduduk terhadap pembangunan yang ada, tanpa memperhitungkan pengaruh kebaikannya. Tidak akan terjadi proses pembangunan tanpa adanya mobilitas penduduk. Tetapi juga tidak akan terjadi pengarahannya penyebaran penduduk yang berarti tanpa adanya kegiatan pembangunan itu sendiri.

Lee (1992) dalam teorinya “ Dorong-Tarik” (*Push-Pull Theory*) berpendapat bahwa migrasi dari desa ke kota disebabkan oleh faktor pendorong di desa dan penarik di kota. Teori tersebut menerangkan tentang proses pengambilan keputusan untuk bermigrasi yang dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan, faktor-faktor rintangan, dan faktor-faktor pribadi. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal dan tujuan dibedakan menjadi tiga, yaitu: faktor-faktor daya dorong (*push factor*), faktor-faktor daya tarik (*pull factor*), dan faktor-faktor yang bersifat netral (*neutral*). Faktor-faktor yang bersifat netral pada dasarnya tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk bermigrasi.

Desa sangat erat hubungannya dengan kemiskinan, karena perekonomian di desa dipandang sangat tertinggal dibandingkan dengan di kota. Tidak hanya itu, sumber daya yang ada di desa baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dianggap tidak memiliki prospek yang bagus untuk kemajuan desa. Sektor pertanian biasanya merupakan mata pencaharian utama di desa, namun pada kenyataannya kini sektor pertanian sudah tidak dapat menyejahterakan warga desa lagi.

Mantra (1981), juga menyebutkan adanya kekuatan yang mendorong penduduk untuk pergi ke daerah lain (kekuatan sentrifugal), yaitu ; ketidakpuasan pendapatan di bidang pertanian, kurangnya kesempatan kerja dan keterbatasan fasilitas. Rusli (1982), menambahkan bahwa tingkat upah yang rendah dari pekerjaan-pekerjaan pertanian mendorong penduduk desa untuk cenderung mencari pekerjaan-pekerjaan non pertanian seperti pekerjaan di bidang industri. Intinya adalah ketidakpuasan terhadap upah atau pendapatan yang diperoleh di tempat asal mendorong seseorang pergi ke kota dan berharap akan mendapatkan upah yang lebih baik.

Setelah sebagian besar warga desa melakukan migrasi ke kota, ternyata mereka tidak tahan berlama-lama hidup di kota. Hal ini bisa jadi karena desa memiliki penahan yang kuat sebagai tempat tinggal, hal tersebut disebabkan adanya ikatan keluarga, biaya hidup murah, dan dapat bercocok tanam. Sementara Mantra (1981) dalam penelitiannya di Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan adanya kekuatan yang menahan penduduk untuk tetap tinggal di desa (kekuatan sentripetal) yaitu; 1. Ikatan kekeluargaan dan persaudaraan yang erat, yang tercermin dari semboyan "*Mangan ora mangan waton kumpul*", 2. Sistem gotong royong yang kuat, yakni tiap warga desa merasa mempunyai tugas moral untuk saling membantu warga desa yang lain, 3. Pemilikan tanah pertanian memberikan status yang tinggi, karena itu enggan meninggalkan desa untuk menetap di daerah lain, 4. Ikatan batin dengan leluhur mereka, dilakukan dengan mengunjungi makam leluhur setiap bulan *ruwah* (sya'ban) dan lebaran (syawal), dan 5. Ongkos transportasi yang tinggi bila dibandingkan dengan pendapatan mereka. Lebih lanjut Mantra (1981) menyebutkan bahwa untuk mengatasi kedua kekuatan ini maka penduduk desa memilih jalan tengah yaitu dengan migrasi sirkuler.

Dari berbagai macam penjelasan tentang keterkaitan antara migrasi sirkuler dan peningkatan ekonomi di desa, dapat dikatakan bahwa migrasi sirkuler menjadi pilihan yang efektif bagi peningkatan ekonomi desa. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan pendapatan dari para pelaku migrasi sirkuler yang setiap bulannya selalu dikirimkan kepada keluarga mereka di desa. Dari uang kiriman para imigran tersebut terlihat adanya peningkatan GDP

desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Sebagian besar uang kiriman tersebut digunakan untuk memperbaiki kebutuhan dasar mereka, seperti ; pangan, sandang, dan papan. Selebihnya uang tersebut digunakan untuk memperbaiki infrastruktur desa.

### **2.3 Dampak Migrasi Sirkuler terhadap Peningkatan Ekonomi Desa**

Migrasi sirkuler muncul untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Adanya migrasi dapat menyebabkan adanya transformasi sosial-ekonomi. Transformasi sosial-ekonomi dapat didefinisikan sebagai “proses perubahan susunan hubungan-hubungan sosial-ekonomi (sebagai akibat pembangunan). Desa dirasa perlu memiliki sebuah lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengelola keuangan para migran guna membantu peningkatan pembangunan desa agar proses pembangunan terkontrol dengan baik.

Pada dasarnya masyarakat pedesaan (khususnya di Jawa) sebenarnya merasa enggan untuk pergi untuk meninggalkan desanya. Akan tetapi karena mekanisme bekerjanya faktor-faktor di luar kemauan dan kemampuan merekalah maka sebagian dari mereka terpaksa pergi meninggalkan desanya. Oleh karena itu, kepergian mereka dari desa, sebagian besar hanya bersifat sementara.

Perpindahan atau migrasi yang didasarkan pada motif ekonomi merupakan migrasi yang direncanakan oleh individu sendiri secara sukarela (*voluntary planned migration*). Para penduduk yang akan berpindah, atau migran, telah memperhitungkan berbagai kerugian dan keuntungan yang akan di dapatnya sebelum yang bersangkutan memutuskan untuk berpindah atau menetap ditempat asalnya. Dalam hubungan ini tidak ada unsur paksaan untuk melakukan migrasi. Tetapi semenjak dasawarsa 1970-an banyak dijumpai pula mobilitas penduduk yang bersifat paksaan atau “**dukalara**” atau terdesak (*impelled*) (Peterson,W:1969). Mobilitas penduduk akibat kerusakan politik atau bencana alam seperti yang terjadi di Sakel ataupun Horn, Afrika merupakan salah satu contoh. Adanya berbagai tekanan dari segi politik, sosial, ataupun budaya menyebabkan individu tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukan perhitungan manfaat ataupun kerugian dari aktivitas migrasi tersebut. Mereka berpindah ke daerah baru dalam kategori sebagai pengungsi (*refugees*). Para pengungsi ini memperoleh perlakuan yang berbeda di daerah tujuan dengan migran yang berpindah semata-mata karena motif ekonomi (Beyer, Gunther;1981; Adelman: 1988).

Terdapat dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh migrasi. Dampak positifnya adalah peningkatan penghasilan para imigran yang berdampak pada peningkatan;

1. Kebutuhan dasar,



Sekarang mereka dapat membeli bahan-bahan makanan yang bergizi dalam jumlah yang lebih banyak, mereka juga dapat memperbaiki rumah-rumah mereka yang biasanya menggunakan bilik sekarang sudah menggunakan tembok, baju yang mereka gunakan lebih modern daripada dulu, seperti penggunaan kebaya yang sudah ditinggalkan dan kini mereka mulai menggunakan kaos dan celana jeans, sudah mulai dibangun beberapa lembaga kesehatan seperti puskesmas dan posyandu di desa guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan juga untuk memperbaiki gizi masyarakat. Kesehatan dan pendidikan adalah investasi yang dibuat dalam individu yang sama.

Modal kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan karena: 1. Kesehatan adalah faktor penting atas kehadiran di sekolah; 2. Anak-anak yang sehat lebih berprestasi di sekolah/ dapat belajar secara lebih efisien; 3. Kematian yang tragis pada anak-anak usia sekolah juga meningkatkan biaya pendidikan per tenaga kerja, sementara harapan hidup yang lebih lama akan meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan; 4. Individu yang sehat lebih mampu menggunakan pendidikan secara produktif di setiap waktu dalam kehidupannya.

Modal pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi kesehatan karena: 1. Banyak program kesehatan bergantung pada berbagai keterampilan yang dipelajari di sekolah (termasuk melek huruf dan angka); 2. Sekolah mengajarkan pokok-pokok kesehatan pribadi dan sanitasi; 3. Dibutuhkan pendidikan untuk membentuk dan melatih petugas pelayanan kesehatan. Setelah adanya peningkatan pendapatan para imigran, perbaikan efisiensi produktif dari investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan yang meningkatkan harapan hidup.

## 2. Infrastruktur

Lembaga pengelolaan penghasilan imigran dapat membantu untuk memperbaiki infrastruktur di desa. Pendanaan pembangunan tersebut diperoleh dari iuran yang dikumpulkan secara kolektif oleh lembaga tersebut untuk memperbaiki beberapa sarana dan prasarana di desa, seperti; jalanan, masjid, gedung sekolah, kantor kepala desa, dan saluran irigasi.

Seperti kasus di Desa Ciasihan, kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Kondisi infrastuktur yang ada di desa pada awalnya sangat buruk, akan tetapi seiring dengan berkembangnya informasi dan semakin luasnya pandangan masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana. Maka dengan uang yang mereka kumpulkan di Lembaga Keuangan Desa, mereka dapat memperbaiki sedikit demi sedikit prasarana yang ada, seperti,

pembuatan WC Umum dan adanya penyaluran air bersih dari gunung melalui selang-selang yang dipasang hingga tempat-tempat penampungan air yang tersedia.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh migrasi sirkuler terhadap pembangunan ekonomi di desa adalah memburuknya keseimbangan struktural antara desa dan kota secara langsung dalam dua hal. *Pertama* di sisi penawaran, migrasi internal secara berlebihan akan meningkatkan jumlah pencari kerja di perkotaan yang melampaui tingkat atau batasan pertumbuhan penduduk, yang sedianya masih dapat didukung oleh segenap kegiatan ekonomi dan jasa-jasa pelayanan yang ada di daerah perkotaan. Lonjakan yang setinggi itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dan semakin lama semakin sulit diakomodasikan, apalagi proporsi migran berusia muda yang memiliki pendidikan dan keterampilan memadai semakin besar. Kehadiran para pendatang tersebut cenderung melipatgandakan tingkat penawaran tenaga kerja di perkotaan, sementara persediaan tenaga kerja yang sangat bernilai di pedesaan semakin tipis. *Kedua*, di sisi permintaan, penciptaan kesempatan kerja di daerah perkotaan lebih sulit dan jauh lebih mahal daripada penciptaan lapangan kerja di pedesaan, karena kebanyakan jenis pekerjaan sektor-sektor industri di perkotaan membutuhkan aneka input-input komplementer yang sangat banyak jumlah maupun jenisnya. Di samping itu, tekanan kenaikan upah di perkotaan dan tuntutan karyawan untuk mendapatkan aneka tunjangan kesejahteraan, serta tidak tersedianya aneka teknologi produksi “tepat guna” yang lebih padat karya juga membuat para produsen enggan menambah karyawan karena sekarang peningkatan output sektor modern tidak harus dicapai melalui peningkatan produktivitas atau jumlah pekerja.

Di samping itu juga adanya penurunan jumlah sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sosial atau kegiatan gotong royong guna membangun desa. Bila hal ini berlangsung terus-menerus dikhawatirkan bahwa kehidupan sosial dan gotong royong yang ada di desa saat ini makin lama akan menjadi sirna.

Hal-hal yang diuraikan di atas terutama tampak dominan untuk daerah-daerah yang jarak antara kota dan desa dapat dikatakan sedang atau jauh (jauh dan sedang dalam arti waktu dan/ atau kemudahan fasilitas transportasi) lain halnya dengan daerah-daerah pedesaan yang dalam arti waktu dan kemudahan fasilitas transportasi tersebut relatif dekat dengan kota.

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga dalam kegiatan Susenas kegiatan ini didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan

makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Jawa Tengah tahun 2008 tercatat sebesar 409,33 ribu rupiah berdasarkan data dari Jawa Tengah Dalam Angka 2011. Rata-rata pengeluaran di kota lebih tinggi dibandingkan di pedesaan, yakni 480,79 ribu rupiah berbanding 341,76 ribu rupiah. Dengan kata lain, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di pedesaan hanya 71,08 persen dari pengeluaran di daerah perkotaan. distribusi pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di negara berkembang dengan tingkat gizi yang masih rendah, pemenuhan kebutuhan makanan sebagai kebutuhan dasar untuk hidup masih merupakan prioritas utama demikian juga yang terjadi di Jawa Tengah baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Berikut akan ditampilkan besaran distribusi pengeluaran khususnya di daerah pedesaan di Jawa Tengah.

Tabel 3. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Tiap Bulan untuk Makanan dan Bukan Makanan daerah Pedesaan di Jawa Tengah Tahun 1996, 1999, 2002, 2005 dan 2008 (Rupiah)

Kelompok	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Tiap Bulan				
	1996	1999	2002	2005	2008
<b>Barang</b>					
Makanan	29.004	70.983	91.056	107.389	204.109
Bukan Makanan	17.402	34.632	52.516	79.825	137.650
<b>Jumlah</b>	<b>46.406</b>	<b>105.615</b>	<b>143.572</b>	<b>187.214</b>	<b>341.759</b>

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa disamping peningkatan migrasi keluar di Provinsi Jawa Tengah, data distribusi pengeluaran rata-rata per kapita juga semakin meningkat tajam. Meskipun pengeluaran di kota dan desa berbeda jauh namun peningkatannya sama-sama besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi kesenjangan ekonomi antara kota dan desa, dengan adanya penduduk yang bermigrasi ke luar desa dan kembali ke desa atau masih berdomisili di desa sehingga sebagian besar penghasilannya dikirimkan ke keluarganya di desa dan dikonsumsi di desa. Hal ini akan mempengaruhi perbaikan ekonomi di pedesaan dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi masyarakat desa setiap tahunnya.

Menurut Todaro (2004), ada beberapa dampak yang dihasilkan dari migrasi sirkuler yaitu penciptaan keseimbangan ekonomi antara kota dan desa. Keseimbangan kesempatan

ekonomi yang lebih layak antara desa dan kota merupakan suatu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam strategi menanggulangi masalah-masalah pengangguran di desa-desa maupun kota-kota di berbagai negara-negara berkembang serta untuk mengurangi migrasi desa ke kota; Perluasan industri kecil yang padat karya. Komposisi atau bauran output sangat mempengaruhi jangkauan (dan dalam banyak hal, termasuk juga lokasi) kesempatan kerja karena beberapa produk (terutama barang-barang konsumsi pokok) membutuhkan lebih banyak tenaga kerja bagi setiap unit output dan setiap unit modal daripada produk atau barang-barang lainnya; Pengurangan laju pertumbuhan penduduk melalui upaya pengentasan kemiskinan absolute dan perbaikan distribusi pendapatan, terutama bagi kaum wanita yang disertai dengan menggalakkan program-program keluarga berencana dan penyediaan pelayanan kesehatan di daerah-daerah pedesaan.

#### **2.4. Peningkatan Ekonomi Desa dalam Peningkatan Pembangunan Ekonomi Indonesia**

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah desa di Indonesia mencapai hampir 70 ribu, dan 45 % diantaranya masuk ke dalam kategori desa tertinggal. Sehingga untuk peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia, tentunya tak dapat lepas dari pembangunan ekonomi di desa-desa yang ada di negara ini. Data dari Statistik Indonesia rata-rata laju pertumbuhan PDRB dari tahun 2006-2010 sebesar 5,62% sejalan dengan rata-rata laju pertumbuhan di Jawa Tengah sebesar 5,50%. Distribusi persentasi PDRB tersebut menurut komponen penggunaannya adalah konsumsi rumah tangga yang mendominasi sebesar 64% dari keseluruhan. Dengan meningkatnya secara spesifik konsumsi rumah tangga di pedesaan menunjukkan bahwa pedesaan merupakan faktor penting bagi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Nasional. Apabila desa dapat meningkatkan perekonomiannya lebih baik, maka dapat dipastikan perekonomian nasional juga akan semakin maju.

Desa atau pedesaan merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan, namun ironisnya hal ini berbanding lurus dengan kondisi kemiskinannya, dimana kantong-kantong kemiskinan juga berada di pedesaan. Masyarakat pedesaan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sangat sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Ketahanan suatu bangsa sebaiknya dibangun dari daerah-daerah, yaitu desa. Sehingga jika sebelumnya telah diketahui dampak migrasi sirkuler terhadap pertumbuhan ekonomi desa, maka dengan adanya peningkatan ekonomi desa inilah akan membuat semakin kuatnya perekonomian dan pembangunan nasional.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian desa. Beberapa usaha pemerintah untuk menanggulangi permasalahan migrasi, adalah sebagai berikut :

1. Persebaran pembangunan industri sampai ke daerah-daerah.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui intensifikasi dan Koperasi Unit Desa
3. Pembangunan fasilitas yang lebih lengkap seperti pendidikan dan kesehatan
4. Pembangunan jaringan jalan sampai ke desa-desa sehingga hubungan antara desa dan kota menjadi lancar.
5. Meningkatkan penyuluhan program Keluarga Berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di pedesaan.

Dengan adanya migrasi yang terkondisikan dengan baik, maka kemudian akan membuat suatu keseimbangan perekonomian antara desa dan kota, dimana hal ini sangat berpengaruh penting dalam pembangunan nasional. Kesempatan ekonomi yang setara antara desa dan kota akan menimbulkan suatu kesempatan kerja yang setara antara desa dan kota sehingga kemudian tingkat migrasi bisa ditekan kembali, sehingga keseimbangan perekonomian desa dan kota bisa terus terjaga. Sehingga adanya peningkatan ekonomi desa melalui migrasi ini bisa dijadikan suatu solusi bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Migrasi adalah suatu proses perpindahan penduduk dari satu lokasi yang produk marginal sosialnya nol ke lokasi lain yang produk marginal sosialnya bukan hanya positif, tetapi juga akan terus meningkat sehubungan dengan adanya peningkatan modal dan kemajuan teknologi.

Migrasi sirkuler merupakan salah satu faktor penting untuk membangun ekonomi desa. Walaupun demikian, migrasi sirkuler dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dalam segi ekonomi, akan tetapi juga dari segi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur desa. Maka dari itu, perlu adanya pensinergian antara pembangunan di desa dan di kota agar tidak adanya ketimpangan jumlah penduduk dari proses migrasi sirkuler.

Dampak yang diharapkan dari migrasi sirkuler yaitu penciptaan keseimbangan ekonomi antara kota dan desa, sebagai strategi dalam perluasan lapangan kerja tidak hanya di kota namun juga di desa sehingga kemudian akan mengurangi angka migrasi dengan sendirinya. Sehingga pembangunan ekonomi Indonesia secara merata akan tercapai, baik di desa maupun di kota.

### **3.2 Saran**

Perlu adanya campur tangan pemerintah daerah dalam mengelola ekonomi suatu desa dan kota agar dapat mengontrol jumlah penduduk desa yang melakukan migrasi sirkuler. Kesadaran masyarakat desa untuk membangun perekonomian di desanya juga sangat diperlukan agar mereka mau berpartisipasi aktif membangun perekonomian di desa mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Goldscheider, Calvin. 1985. *Populasi, Modernisasi dan Struktur Sosial*. Terjemahan oleh Algozali Usman dan Andre Bayo Ala. CV Rajawali.
- BPS, 2005. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta-Indonesia.
- Lee, E.S. 1992. *Teori Migrasi* (Terjemahan), Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- Mantra, I.B. 1992. *Mobilitas Penduduk Sirkuler Dari Desa ke Kota di Indonesia*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.

- Mantra, I.B. 2000. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Oishi, N. 2002. *Gender and Migration: An Integrative Approach*, Working Paper No. 49 March, 2002.
- Rusli, Said, 1984. Gerak Penduduk dan Sirkulasi Tenaga Kerja Pedesaan. Prisma, No.1, tahun XIII.
- Suharso, 1996. “Kaitan Desa-Kota: Migrasi Sirkuler dan Sektor Informal” dalam Bahan Bacaan Praktikum Pengantar Ilmu Kependudukan, Penerbit Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Susilowati, S.H., Sugiarto, A.K. Zakaria, W. Sudana, H. Supriyadi, Supadi, M. Iqbal, E. Suryani, M. Sukur, dan Soentoro. 2000. Studi Dinamika Kesempatan Kerja dan Pendapatan Pedesaan (PATANAS). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Titus, Milan J. 1991. *Regional and Rural Development Planning*, Faculty of Geography UGM.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ke 8.
- <http://us.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/09/tgl/12/time/163933/idnews/673876/idkanal/10>
- <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2846/>
- <http://www.scribd.com/doc/13619836/Membangun-Desa-Membangun-Indonesia>